



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2022

KEMEN-ESDM. Balai Besar Survei dan Pemetaan
Geologi Kelautan. Orta.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang geologi kelautan, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pembentukan Balai Besar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang geologi kelautan.

Pasal 2

- (1) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Geologi.

- (2) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan survei di bidang geologi kelautan;
- c. pelaksanaan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- d. pengelolaan data dan informasi teknis geologi kelautan;
- e. pelayanan jasa survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- g. pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana, program dan anggaran, keuangan, urusan hukum, kerja sama, pengelolaan informasi, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang milik negara; dan
- h. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 12

Ketentuan mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Geologi secara berkala.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam lingkup hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 17

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 22

Penataan organisasi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LOKASI BALAI BESAR

Pasal 25

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

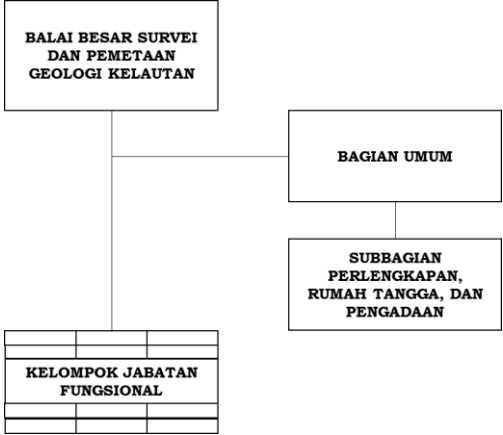
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI
KELAUTAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF